

Current issues, in-depth discussions and solutions.

Keretakan dan Perubahan

Fenomena keretakan atau patahan (rupture) dalam kajian sejarah sering merujuk pada peristiwa revolusi seperti Perancis (1789). Dalam konteks Indonesia, patahan sejarah itu ditabalkan pada momen Revolusi Kemerdekaan (1945), pergantian Orde Lama ke Orde Baru (1966) dan kebangkitan Gerakan Reformasi (1998). Masyarakat mengalami trauma karena perubahan besar itu menimbulkan resiko/korban besar.



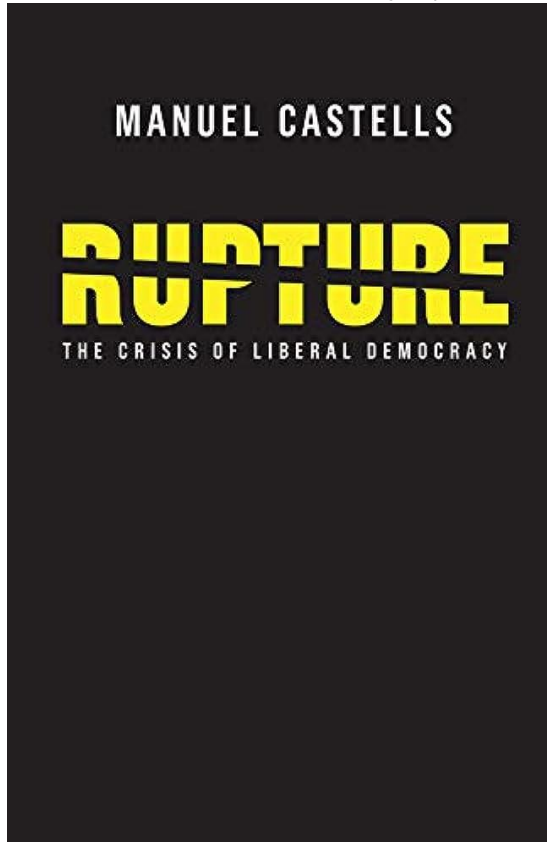
Pergeseran Konstelasi Nasional dan Keretakan di Partai Politik Menjelang Pemilu 2024

Tim Riset

Sebagian orang merasa cemas apabila menghadapi wacana perubahan (*change*) sebab posisi dan kepentingannya mungkin terancam. Karena itu mereka lebih suka keberlanjutan (*continuity*), terutama kelompok mapan (*establishment*) dan kepentingan yang bercokol (*vested interest*). Perlu identifikasi warga yang paling terpinggirkan (*marginalized*) dan tidak diuntungkan (*disadvantage*) dengan kondisi saat ini dan warga yang masih ragu-ragu/ambigu antara keinginan untuk berubah atau berlanjut dengan keamanan.

Dalam skala organisasi, model 3 tahap perubahan yang dicanangkan Kurt Lewin (1958) cukup relevan, yakni mencairkan suasana/hubungan antar aktor dengan lingkungan (*unfreeze*), kemudian mengubah bentuk/format hubungan yang diinginkan (*change/reshape*), dan akhirnya menyolidkan format baru yang menjadi tujuan (*refreeze*). Model ini diibaratkan seperti es batu yang harus dicairkan lebih dulu, kemudian ditaruh dalam wadah/bentuk yang diinginkan, lalu dibekukan kembali. Dalam proses ini dibutuhkan dialog dan fasilitas agar warga yang menjadi subyek perubahan merasa nyaman, tidak terganggu eksistensi/identitasnya.

Pada skala makro, perubahan sosial melibatkan aktor/organisasi dan struktur sosial lebih kompleks. Dalam bukunya **Rupture: The Crisis of Liberal Democracy** (2018), Manuel Castell memeriksa gerakan besar dari pembangkangan massal terhadap orde kemapanan yang bersumber dari dinamika mayoritas warga di dunia saat ini yang tidak percaya atas keterwakilan politik, partai politik arus utama, lembaga politik yang mapan atau pemerintahan. Castell yang terkenal dengan karya-karyanya tentang **Information Age** (1996) dan **Theory of Urban Social Movement** (1983) menyimpulkan keretakan sosial yang hadir dari



perkembangan politik di Dunia Barat dengan kemunculan Donald Trump di AS dan Emmanuel Macron di Perancis, hasil referendum Brexit dan krisis politik di Uni Eropa, termasuk kebangkitan gerakan sayap kiri Podemos di Spanyol.

Pandangan Castell yang menarik adalah bagaimana kesadaran diri (**the Self**) seorang aktor muncul dan terbangun di tengah jalinan hubungan global di era digital (**the Net**). Perspektif ini penting dipahami karena mayoritas warga dan pemilih di Indonesia pada tahun 2024 adalah kalangan millennial dan Gen Z, mereka yang terkoneksi dengan jaringan global melalui berbagai platform media sosial dan berpartisipasi dalam beragam ruang publik.

Fenomena keretakan atau patahan (*rupture*) dalam kajian sejarah sering merujuk pada peristiwa revolusi seperti Perancis (1789) yang menandai berakhirnya era Monarki di Eropa menuju Republik. Dalam konteks Indonesia, patahan sejarah itu ditabalkan pada momen Revolusi Kemerdekaan (1945), pergantian Orde Lama ke Orde Baru (1966) dan kebangkitan Gerakan Reformasi (1998). Masyarakat mengalami trauma karena perubahan besar itu menimbulkan resiko/korban besar yang mungkin menimpa mereka secara personal. Sebenarnya gejala patahan dalam lingkup sosial-politik tidak mesti perubahan luas dan mendasar (revolusioner), melainkan bisa pula pergantian rezim atau pergeseran (*shifting*) konstelasi kekuatan politik dan ekonomi. Pergeseran posisi akan mengakomodasi sejumlah kepentingan baru, sambil menata ulang kepentingan lama. Dalam ranah intelektual, Piere Bourdieu (1997) menengarai pergeseran relasi di arena sosial (*field*) akan mempengaruhi cara pandang dan sikap (*habitus*), selanjutnya akan membentuk perilaku dan melahirkan transformasi sosial. Momen pemilihan umum merupakan kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan refleksi dan evaluasi terhadap kondisi yang sedang berlangsung, sekaligus membuka peluang untuk melakukan koreksi dan perubahan yang diinginkan.



Kejutan Survei dari Mancanegara

Survei independen yang dilakukan lembaga polling asal Australia tentang persepsi warga Indonesia menarik disimak dan cukup mengejutkan. Berbeda dengan lembaga survei domestik, Utting Research merilis hasil survei tentang elektabilitas bacapres di Indonesia, yakni Ganjar Pranowo (34 persen), Prabowo Subianto (33 persen) dan Anies Baswedan (27 persen). Sementara 3 persen responden menjawab rahasia atau belum memutuskan, dan 3 persen lagi tidak menjawab.

Yang menariik, lembaga survei pimpinan John Utting tersebut menanyakan kepada responden: visi-misi kandidat seperti apakah yang diinginkan, apakah mencanangkan perubahan atau keberlanjutan? Responden yang menginginkan melanjutkan sebagian kebijakan pemerintahan Jokowi dan memperbaiki sebagian lainnya mencapai 61 persen. Sedangkan yang menginginkan pemerintahan baru sebaiknya membuat kebijakan baru dan berbeda sebesar 20 persen. Yang menginginkan keberlanjutan sepenuhnya hanya 18 persen. Ini berarti peluang kandidat oposisi (AB) lebih besar dibanding dua kandidat yang mewakili petahana (GP dan PS).

Survei dilakukan 12-17 Juni 2023 secara tatap muka dengan jumlah sampel responden sebesar 1.200 yang tersebar secara proporsional di 34 provinsi di Indonesia. Survei itu menggunakan metode multistage random sampling, dengan margin of error sebesar 2,8 persen pada tingkat kepercayaan mencapai 95 persen. "Pilpres 2024 Indonesia sangat menarik. Hingga delapan bulan menjelang hari-H, pemenangnya masih sangat tidak jelas. Tiga kontestan terkuat masih sangat berimbang elektabilitasnya," ujar John Utting dalam siaran persnya.

Skenario terbaik bagi Presiden Jowo Widodo selaku petahana di akhir masa kekuasaannya adalah bersatunya kubu GP dan PS. Namun, GP sudah didaulat PDIP sebagai bacapres dan menjadi "petugas partai" sesuai perintah Ketum Megawati, sehingga Jokowi tidak bisa intervensi. Berkolaborasi dengan PS menjadi lebih terbuka bagi Jokowi karena sebagai Menhan, PS sangat loyal dan Partai Gerindra membuka diri apabila Jokowi siap menjadi Ketua Umum atau Ketua Dewan Pembina suatu hari. Mimpi Jokowi untuk memimpin partai besar pasca kekuasaannya sebagai presiden akan segera terpenuhi.

Resafel Kabinet untuk Timses Pilpres

Begitu besarnya mimpi sekaligus kegelisahan Jokowi, sehingga di akhir periode kedua kekuasaannya menyatakan harus cawe-cawe (intervensi), dalam bahasa diplomatis, "demi menjaga keberlanjutan demokrasi di Indonesia". Sejumlah pengamat mengeritik bahwa sikap cawe-cawe itu justru merusak proses demokrasi dan berpotensi melanggar konstitusi UUD NRI Tahun 1945. Salah seorang pakar hukum tata negara yang paling keras mengeritik Jokowi adalah Denny Indrayana yang sudah mengajukan proposal pemakzulan Jokowi karena dinilai melanggar konstitusi.



Bentuk cawe-cawe terkini adalah resafel kabinet yang sebenarnya merupakan hak prerogatif Presiden, namun resafel itu (17/7//2023) menimbulkan kontroversi baru. Karena Jokowi menunjuk pengganti mantan Menkoinfo Johnny G. Plate (Nasdem) dari

kalangan relawan Projo (Budi Arie Setiadi). Protes terbuka belum terdengar dari kalangan politisi partai, malah justru dari kalangan aktivis, yakni Hendaradi (Ketua Dewan Nasional Setara Institute) yang menyebut: "Ini adalah salah satu reshuffle terburuk yang dilakukan Presiden Jokowi di ujung masa jabatannya. Jokowi tidak mencari sosok yang kompeten dan berintegritas sebagai antithesis pejabat sebelumnya (yang terjebak korupsi). Justru menunjuk sosok yang tidak punya kapasitas dan rekam jejak di bidang yang dibutuhkan Kemenkoinfo." (Republika, 18/7/2023)

Kritik keras itu menandakan perpecahan di kalangan aktivis/relawan pendukung Jokowi yang sejak Pilpres 2014 telah menggerakkan akar rumput. BAS diketahui saat ini memperlihatkan dukungan kepada Prabowo Subianto selaku Bacapres 2024. Tentu saja penunjukkan BAS sebagai Menkoinfo mencerminkan dukungan Jokowi terhadap sikap politik BAS yang sebelumnya menjabat Wamen Desa. Jokowi terang-terangan memperlihatkan kedekatan dengan Menhan Prabowo, meskipun tetap menjaga hubungan dengan Ganjar Pranowo yang sudah ditunjuk resmi oleh Ketum Megawati sebagai bacapres PDIP 2024. Sikap ambigu Jokowi ditunjukkan dengan membentuk Tim 7 untuk membantu proses sosialisasi GP.

Komposisi Wamen baru membuktikan bahwa Jokowi sedang menerjemahkan cawe-cawe sebagai memperkuat tim sukses pilpres 2024. Bukan demi perbaikan kinerja pemerintahan, setelah dilanda skandal korupsi proyek BTS yang merugikan negara senilai Rp 8 triliun. Selain Menteri BAS, Jokowi juga mengangkat Nezar Patria (relawan/wartawan Tempo yang pernah menjabat Direktur PT Pos Indoensia dan Staf Khusus Menteri BUMN) sebagai Wamen Kominfo. Meski tak sekuat Kementerian Penerangan di masa Orde Baru, birokrasi Kemenkoinfo bekerja hingga pelosok daerah menguasai saluran informasi nasional dan lokal, termasuk media konvensional dan media sosial baru. Saluran itu berguna untuk kampanye publik (pembentukan opini dan citra) serta penetrasi langsung ke pengguna handphone dan pemilik akun medsos.

Tak cukup dengan itu, Jokowi juga mengangkat Dubes RI untuk Amerika Serikat, Rosan Perkasa Roeslani, sebagai Wamen BUMN. Tindakan itu merupakan cadangan, apabila Menteri BUMN (Erick Thohir) betul-betul ditetapkan salah satu kandidat terkuat cawapres mendampingi Prabowo. Peluang ET sebagai cawapres GP sudah tertutup dengan munculnya Sandiaga Shalahuddin Uno yang diusulkan PPP. Jika akhirnya ET benar maju sebagai cawapres, maka harus mengundurkan diri dari kabinet, dan posisinya segera diganti RPR kawan seangkatan ET saat kuliah di AS. Bersama Sandiaga, sesungguhnya ET dan RPR adalah Trio kawan lama seangkatan yang merintis bisnis di AS. Mereka berkongsi dalam beberapa entitas bisnis: RPR dan SSU mendirikan Recapital Group (fund management), Sandi dan kakak ET (Garibaldi Thohir) mendirikan Adaro Energy (perusahaan



tambang batu bara terbesar kedua di Indonesia). Trio investor muda itu menguasai lingkaran inti kekuasaan politik. Siapapun Bacapresnya, trio investor sebagai cawapres atau penyandang logistik utama.

Perangkat timses semakin lengkap dengan

ditunjuknya Paiman Raharjo (koordinator relawan Sedulur Jokowi) selaku Wamen Desa, jaringan birokrasi yang melayani masyarakat hingga pelosok desa terpencil/tertinggal dan daerah transmigrasi. Dana Desa yang bersumber dari APBN sebesar Rp 70 triliun per tahun, sementara yang berasal dari APBD yaitu sebesar 10 persen dari Dana Alokasi Umum ditambah Dana Bagi Hasil. Total Dana Desa yang sudah disalurkan sejak 2015 hingga 2022 adalah Rp 468,9 triliun. Tiap Desa mendapat Rp 600-900 juta per tahun, sementara jumlah Desa di seluruh 83.794 Desa/Kelurahan. Ini merupakan potensi jaringan relawan yang paling luas di akar rumput. Tidak aneh, bila tokoh muda muda PDIP Budiman Sujatmiko pernah berambisi sebagai Menteri Desa, saat mengusung RUU Desa di DPR RI pada tahun 2011.

Cawe-cawe Jokowi tetap berlangsung di hari libur (16/7/2023), Jokowi bertemu Prabowo dan Erick di Istana Bogor. Topik resminya adalah industri pertahanan nasional, namun publik menangkap kesan: Jokowi mendukung pasangan Prabowo-Erick. Hal itu tentu saja menyulut emosi kubu GP. Tetapi, beberapa tokoh penting PDIP ternyata juga mendekati ke Prabowo, antara lain Effendi Simbolon yang memuji Prabowo di forum Rakernas Marga Simbolon (Batak), begitu pula Budiman Sujatmiko yang berkunjung langsung ke rumah Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta. ES sudah ditegur DPP PDIP, sementara BS siap dipanggil DPP, tapi punya argumen: "Pertemuan kami pribadi dengan tujuan menyatukan kelompok nasionalis." Apakah GP (PDIP) akhirnya akan berkoalisi dengan PS (Gerindra) demi menghadapi AB (oposisi)? Sangat tergantung dari hubungan Megawati dengan Jokowi dan Prabowo sendiri.

Geger Munaslub Golkar

Suasana asal bukan Anies sangat terasa di kalangan koalisi petahana, sehingga siapapun yang berusaha mendekati atau menjalin komunikasi dengan AB akan dihabisi atau dikriminalisasi. Gejolak terkini di Partai Golkar, ketika sejumlah tokoh senior Dewan Pakar (dipelopori Ridwan Hisyam) menuntut penyelenggaraan Munas Luar Biasa untuk mengganti Ketum Airlangga Hartarto. Dengan alasan, AH dipandang gagal mendongkrak elektabilitas partai beringin menjelang pemilu 2024 dan belum menentukan sikap sebagai Capres dari Golkar. Sementara rencana Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) Bersama PPP dan PAN pun dipandang sudah bubar, akibat PPP menyatakan dukungan kepada GP dan berkoalisi dengan PDIP, sedangkan PAN terang-terangan mendukung Erick sebagai cawapres untuk mendampingi Prabowo. Tiap partai membawa kartu hidupnya masing-masing, sedangkan Golkar jadi kartu mati di tengah AH.

Dalam kondisi terjepit, setelah gagal membangun koalisi alternatif, AH mencoba komunikasi dengan kandidat oposisi. Sebuah pertemuan tertutup diatur, agar AH bertemu dengan AB, bahkan sampai-sampai AB harus bergonta-ganti kendaraan untuk menemui AH. Mirip film cerita detektif. Bagaimanapun

rapinya, pertemuan itu bocor dan menimbulkan kegemparan di kubu koalisi pemerintahan. Sebelumnya AH juga sudah bertemu dengan petinggi PKS dan membahas peluang koalisi "cabe rawit" yang akan mengubah peta politik nasional dengan bersatunya kubu nasionalis-religius. Tapi, PKS sudah terikat koalisi dengan AB, sehingga AH perlu bergandengan dengan AB, bila ingin membawa perubahan besar.



Resikonya juga besar, kasus korupsi izin ekspor minyak mentah kelapa sawit (CPO) dilanjutkan kembali oleh Kejagung dengan memeriksa AH selaku Menko Perekonomian (24/7/2023). AH diperiksa selama 12 jam, tatkala akan meninggalkan kantor Kejagung, pengawal AH berteriak kepada kerumunan massa dan para wartawan yang mengerubungi: "Woi, buka jalan woi! Buka jalan! Gua tembak! Tembak Lo!". Insiden itu menimbulkan kegemparan tersendiri di tengah kasus korupsi yang merugikan negara senilai Rp 6,47 triliun yang memaksa tiga perusahaan besar sebagai tersangka: Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group. Ketiga perusahaan itu selama ini dikenal sebagai donator politik, sehingga kasus CPO itu merupakan pukulan tersendiri.

Tuntutan Munaslub Golkar semakin gencar karena tokoh sekelas Idrus Marham (mantan Sekjen) ikut turun tangan berkomunikasi ke sejumlah DPW/DPD Golkar. Kubu Golkar pun terbelah antara pro dan anti-AH. Calon alternatif Ketum Golkar, bila Munaslub jadi dilaksanakan adalah: Luhut Binsar Panjaitan (Dewan Pembina PG dan Menko Marinvest), Bambang Soesatyo (Wakil Ketum PG dan Ketua MPR RI), dan Bahlil Lahadalia (mantan pengurus PG dan Kepala BKPM). Munculnya nama-nama tersebut yang dekat dengan kekuasaan menimbulkan persepsi bahwa Jokowi ikut berpengaruh, meskipun secara terbuka menyatakan: "Saya tidak tahu-menahu urusan internal partai. Itu urusan internal Golkar." Gesekan kepentingan bisa menjadi gempa politik tersendiri di kubu Golkar.

Tetapi, AH dengan cerdas bertemu langsung Jokowi berbicara empat mata (26/7), lalu esok harinya bertemu dengan Puan Maharani selaku Ketua PDIP (27/7). AH menyatakan Golkar dan PDIP telah membentuk tim teknis untuk menjalin komunikasi lebih intensif, tim teknis Golkar dipimpin oleh Mechias Marcus Mekeng, politisi senior. Apakah itu pertanda Golkar akan bergabung koalisi dengan PDIP dan menyepakari GP sebagai bacapres? Tokoh muda Golkar Nusron Wahid mengusulkan sebaiknya Golkar mengajukan Ridwan Kamil sebagai cawapres, karena AH tak mungkin jadi bacapres. Sehingga Golkar punya posisi tawar yang kuat di depan partai lain, termasuk PDIP. GP tinggal memilih; apakah Sandiaga atau RK sebagai cawapres?

AH menyebut langkah bertemu Puan sudah diketahui Jokowi. Itu menjadi tameng baginya dari orang-orang yang menentangnya dan mau menggelar Munaslub. Pesaing AH tidak bisa mengklaim dapat dukungan Jokowi (karena Jokowi sudah menyatakan tidak akan ikut campur urusan internal Golkar). Tetapi, AH membuka peluang koalisi lain ketika bertemu dengan Muhaimin Iskandar, pada hari yang sama pertemuannya dengan Puan. Apabila Prabowo benar menggandeng Erick dan Gus Muhaimin tak puas, maka PKB bisa berkoalisi dengan Golkar. Partai-partai yang kecewa bisa membangun koalisi alternatif. Hal itu mungkin terjadi di injury time, masa akhir pendaftaran Capres/Cawapres ke KPU (19 Oktober - 25 November 2023), ketika ancaman kriminalisasi memuncak dan tidak mungkin efektif.

Berdasarkan pengalaman Pemilu 2019, PKB sempat akan membangun koalisi alternatif dengan PKS dan PAN, dimana Jenderal Gatot Nurmantyo (mantan Panglima TNI) populer sebagai bacapres saat itu. Pada jam-jam terakhir sebelum pendaftaran, Cak Imim yang ditunggu petinggi partai lain tidak datang untuk menyepakati koalisi. Rupanya kasus korupsi di Kemenakertrans (2011) yang terkenal sebagai skandal kardus durian (Rp 1,5 miliar) menjadi ganjalan utama. Apakah peristiwa itu akan terulang kembali menjelang pemilu 2024,, atau ada plot berbeda?

Goncangan Nasdem



Bagaimana kondisi oposisi dan peluang kandidat oposisi? Partai Nasdem yang menempuh jalan oposisi di ujung pemerintahan Jokowi melakukan Apel Siaga Perubahan di Gelora Bung Karno (16/7/2023) sebagai show of force untuk menunjukkan bahwa Surya Paloh siap menghadapi segala tantangan. Puluhan ribu massa yang hadir menjadi modal SP dan Nasdem untuk berhadapan dengan Jokowi dan koalisi pemerintahan. Pada apel besar itu tentu hadir pimpinan PKS dan Demokrat sebagai mitra Koalisi Perubahan, tapi yang mengejutkan juga ada perwakilan pengurus DPP Golkar. Esoknya, hari Senin (17/7/2023) pagi dilakukan resafel kabinet, dimana Nasdem kehilangan satu kursi Menteri dan tidak digantikan kadernya. Senin siang harinya, SP menemui Jokowi. Pertemuan empat mata itu menunjukkan kualitas hubungan yang berbeda antara SP-Jokowi dibandingkan dengan hubungan personal Mega-SBY (yang sampai sekarang

mengalami jalan buntu untuk bertemu langsung) atau Mega-Prabowo (yang juga mengalami panas-dingin sesuai cuaca politik).

Patut dicatat, SP mendukung Jokowi sejak awal Pilpres 2014. Kedua tokoh itu memiliki akses investasi langsung ke RRC, namun setelah SP secara terbuka mendukung AB sebagai Bacapres, akses dana SP ke Group Sonangol (RRC) terputus, sehingga megaprojek Gedung Indonesia 1 di Jalan MH Thamrin terbengkalai, padahal sudah disetujui pembiayaan senilai Rp 8 triliun. Posisi Nasdem sangat ditakui dalam kabinet Jokowi periode pertama karena Jaksa Agung (M. Prasetyo) dipegang oleh kadernya. Berbagai kasus hukum yang ditangani Jakgung Prasetyo mengakibatkan keretakan hubungan SP (Nasdem) dengan Megawati (PDIP). Sehingga pada periode kedua, Jokowi menggantikan Prasetyo dengan Sanitiar Burhanuddin (adik dari politikus PDIP TB Hasanuddin). Sebenarnya skandal korupsi BTS Kominfo melibatkan banyak tokoh penting, antara lain Hapsoro Sukmonohadi (suami Puan Maharani) pemilik PT Basis Utama Prima atau Basis Investment yang rekening perusahaannya diblokir PPAK karena terkait korupsi pengadaan tower BTS. Selain itu, Menpora Dito Ariotejo diduga menerima suap senilai Rp 27 miliar saat menjabat Staf Khusus Kemenko Perekonomian (pada bulan November-Desember 2022), sebagaimana kesaksian Komisaris PT Solitechmedia Synergy Irwan Hermawan di pengadilan.

Kasus korupsi tower BTS yang menimpa Menkoinfo Johny G. Plate merupakan episode terkini, yang mungkin dilanjutkan dengan kasus Mentan Syahril Yasin Limpo, kader Nasdem lain. Pemeriksaan kasus korupsi BTS dalam persepsi publik, ditujukan khusus kepada pihak yang berseberangan dengan pemerintah, sebab sejumlah nama yang dekat dengan kekuasaan tidak dilanjutkan pemeriksaannya dan tidak dijadikan tersangka berikutnya. Kejugung telah menjadi alat penekan yang menakutkan. Nasdem seperti merasakan karma politik.

Nasdem menerima dampak cukup berat akibat mendukung bacapres oposisi (AB). Selain dijauhi dari rencana politik Jokowi dan diincar secara hukum, beberapa tokoh Nasdem juga mengundurkan diri karena tidak sejalan dengan sikap politik SP, antara lain Enggartiasto Lukita, Connie Rahakundini Bakrie, Zulfan Lindan dan sejumlah tokoh lain. Siswono Judo Husodo sudah lama mengundurkan diri karena usia tua, tapi momennya berdekatan dengan pengumuman bacapres AB. Pilihan untuk keluar dari koalisi pemerintahan dan membangun koalisi perubahan juga bukan alternatif yang nyaman, karena di koalisi baru terjadi dinamika dan Nasdem tampaknya tidak suka dengan sikap Demokrat yang memaksakan AHY sebagai bakal cawapres mendampingi AB. Hal itu dinyatakan Ahmad Ali selaku Wakil Ketua Umum Nasdem, karena menginginkan tokoh alternatif yang akan memperbesar peluang kemenangan AB dalam pilpres 2024. Posisi Ahmad Ali sangat penting di tubuh Nasdem, karena dia yang menguasai jaringan pengurus wilayah di Indonesia dan berpotensi besar menjadi penerus SP sebagai Ketua Umum.

Demokrat Ngotot

Sementara itu, Partai Demokrat mengalami tekanan bertubi-tubi dengan gugatan hukum Moeldoko (Ketua KSP) yang mengajukan Peninjauan Kembali (PK) di MA. Permohonan PK Moeldoko menggugat Menkumham Yasonna H. Laoly dan AHY selaku Ketum Demokrat diajukan pada 15 Mei 2023 dan teregister dengan nomor perkara: 128/PK/TUN/2023. Belum ada majelis hakim yang ditunjuk untuk mengadili perkara tersebut. Biasanya MA menghabiskan waktu maksimal 3 bulan



untuk memutus permohonan PK. Sekitar bulan Agustus/September 2023 akan diketahui nasib Partai Demokrat. Apabila PK ditolak MA, maka Demokrat akan aman menuju pemilu 2024, namun jika PK diterima MA maka tak hanya PD yang terancam gagal ikut pemilu, melainkan pencalonan AB juga terancam sebagai capres.

Jokowi tidak pernah berkomentar tentang manuver dan tuntutan Moeldoko, bahkan sejak mantan Panglima TNI itu menggalang Kongres Luar Biasa PD. Sikap diam Jokowi, dan tidak mencegah/melarang Kepala KSP untuk bermanuver politik, menunjukkan pembiaran atau persetujuan dalam diam. Dalam pertemuan tertutup (9 Maret 2021) dengan AHY di Istana Bogor, Jokowi menyatakan bahwa ia tidak tahu-menahu dengan tindakan Moeldoko. Tapi, publik melihat jelas manuver politik Moeldoko yang memanfaatkan posisinya di lingkaran inti kekuasaan.

Bila prinsip zero sum game yang dianut elite politisi saat ini, maka pertarungan politik akan semakin keras menjelang penetapan capres pada bulan November 2023. Skenario dua pasangan (All Jokowi's Men) merupakan formula paling ideal untuk menggaransi keberlanjutan kekuasaan petahana. Membuka peluang kandidat Capres dari koalisi oposisi akan sangat beresiko, karena itu gangguan terhadap Nasdem, Demokrat dan PKS akan terus terjadi hingga detik terakhir pencapresan.

Di tengah kondisi sulit, AHY memanfaatkan keterbatasan gerak dan keterpaksaan AB untuk memilih bakal cawapres yang "bersedia" menanggung resiko politik, meski belum tentu memberi kemenangan dalam pilpres. Calon potensial, seperti Khofifah Indar Parawansa (Gubernur Jawa Timur) berulang kali didekati, tapi menolak untuk bertemu, apalagi dicalonkan sebagai cawapres. Dalam pandangan Khofifah, langkah cawapres sangat beresiko, sehingga ia lebih fokus mempersiapkan diri menuju pemilihan Gubernur Jatim periode kedua (2024-2029).

Padahal, jika Khofifah berani menempuh resiko sebagai cawapres, maka momen Pilpres 2024 menjadi ajang uji elektoralnya. Apabila sukses, maka terbukti bahwa mayoritas Indonesia mendukung perubahan, hal itu menjadi peluang Khofifah untuk menjadi orang nomor 1 di Indonesia pada periode berikutnya. Sementara, jika gagal sekalipun dalam Pilpres 2024, Khofifah tidak akan kehilangan peluang sedikitpun untuk mengikuti Pilkada pada bulan November 2024. Bahkan, tingkat popularitasnya akan lebih tinggi dari kondisi saat ini. Peluang yang sama sebenarnya juga terbuka untuk AB, jika gagal menjadi bacapres atau kalah dalam Pilpres (bulan Februari 2024), maka masih terbuka peluang untuk maju dalam Pilkada (DKI Jakarta) bulan November 2024.

Kapasitas untuk menanggung resiko sambil melihat peluang tampaknya dipraktikkan oleh RK, yang siap menjadi cawapres dari Golkar atau menjadi Calon Gubernur pada Pilkada 2024. Dengan latar belakang sebagai pengusaha, sikap politik Sandiaga juga sudah bisa diprediksi: tentu siap sebagai cawapres GP (atas dukungan PPP), namun juga siap sebagai Calon Gubernur jika gagal maju Pilpres. Politik tidak bisa dipandang dengan kaca mata hitam-putih, bukan harus memilih



hadapi resiko atau rebut peluang. Tetapi, dalam setiap resiko, ada peluang sekecil apapun. Namun, dalam sebuah peluang ada resiko sekecil apapun. Politisi yang matang ialah mereka yang selalu optimistis di tengah tekanan seberat apapun, tetapi sekaligus waspada di hadapan peluang sebesar apapun.

PKS Slow Living

Di tengah kebingungan publik, amat menarik untuk mencermati kiprah PKS yang tampak santai, dalam istilah gaya hidup kontemporer disebut *slow living* (hidup apa adanya). Berpolitik apa adanya, tidak tampak ambisi untuk mendorong kadernya sebagai bakal cawapres pendukung AB, meskipun nama Ahmad Heryawan selaku Gubernur Jawa Barat dua periode (2008-2018) sempat muncul dalam perbincangan publik, atau nama Salim Segaf al-Jufri sempat terdeteksi dalam radar penokohan nasional. Politisi PKS seperti tidak berpolitik dalam kaca mata normal, yakni berkampanye untuk layak mendapat kepercayaan masyarakat dan memegang otoritas tertentu. Sikap tidak berpolitik (unpolitical act) bisa dipandang sebagai kekuatan karena menunjukkan kejujuran (honest) dan kebersahajaan (humble), tetapi bisa jadi kelemahan karena memperlihatkan ketidaktahuan (ignorance) dan ketidakmampuan (incapacity).

Harus dilihat konteksnya, sebab sikap tidak menunjukkan intensi dan ambisi tertentu akan melemahkan posisi tawar dengan mitra koalisi atau kompetitor politik. Elite partai lain akan memandang bahwa PKS sudah tertakar "harganya" (*under-valued*) dan mudah ditebak sikap/arah politiknya. Dalam sudut pandang realisme/pragmatisme politik, pihak lain bisa memandang PKS hanya peduli dengan kompensasi tertentu, sehingga tidak akan ngotot memperjuangkan atau mengkampanyekan tokoh tertentu. Sebagai partai kelas tengah (*middle political party*), PKS bisa terjebak pada mental kompromi dan menerima deal politik apa adanya (medioker). Sikap itu bisa dipahami karena ukuran elektoral yang masih terbatas (8,21 persen dari total suara nasional) dan porsi parlemen yang minoritas (8,7 persen dari 575 kursi DPR RI). Tetapi, jika PKS ingin menjadi pelopor dari proses perubahan konstelasi nasional, sikap menerima apa adanya (*slow living*) itu saja tidak memadai.

Tokoh-tokoh PKS perlu tampil dengan gagasan-gagasan nyata untuk memperbaiki kondisi bangsa yang sedang tidak baik-baik saja. Tampilnya tokoh PKS di ruang publik itu tidak hanya untuk memperebutkan kursi yang terbatas (seperti bacapres/bacawapres), sebab akan berdampak pada peluang politik di daerah (pilkada), dan bahkan menentukan eksistensi PKS (dalam pemilu legislatif nasional). Adalah suatu kongklusi yang keliru, mengharapkan dampak elektoral bacapres (coat-tail effect) dengan tidak menampilkan tokoh partai yang genuin mewakili aspirasi anggota dan konstituen. Sebab, hal itu sama saja dengan bunuh diri politik, menyerahkan dukungan anggota/konstituen kepada tokoh lain. Langkah politik PPP yang merekrut Sandiaga dan RK yang sengaja masuk Golkar sudah cukup jelas sebagai pelajaran, bahwa pembesaran elektabilitas tokoh sejalan dengan pembesaran suara partai yang menjadi rumah aspirasinya. Bahkan, sikap Nasdem yang pertama kali mendeklarasikan AB sebagai bacapres dan Demokrat yang ngotot menjadikan AHY sebagai bacawapres dapat dimaknai sebagai upaya menjaga eksistensi dan membesarkan pengaruh partai.

Strategi penokohan yang sejalan dengan pembesaran suara partai bisa dimulai dari level bawah, yakni pertama, **Fungsionaris Partai** harus memahami ruang lingkup tugas dan target politiknya. Pada level ini, kita bisa menyatakan bahwa seorang Ketua DPRa harus mampu berkomunikasi dan berkapasitas sejajar dengan Lurah dan seorang Ketua DPC sejajar dengan kapasitas seorang Camat di lingkungannya. Demikian pula, seorang Ketua DPD dan DPW harus mampu menjadi mitra sejajar dengan Walikota/Bupati dan Gubernur di wilayahnya. Kapasitas itu digembleng dalam sekolah kepemimpinan yang berjenjang dan memiliki parameter jelas. Dalam konteks berbeda, seorang Ketua Bidang/Badan/Fraksi dalam struktur kepengurusan harus menguasai bidang kerjanya masing-masing. Misalnya, Ketua DPP Bidang Ekonomi dan Keuangan, maka harus memiliki kemampuan untuk mengkritisi kebijakan Menteri Keuangan dan Perekonomian. Dalam khazanah politik modern, partai oposisi bisa membentuk shadow government (kabinet bayangan) karena kepakaran dan dedikasinya, sehingga siap mengganti pemerintahan ketika menang pemilu. Jangan sampai oposisi yang berapi-api, tetapi ketika menang pemilu malah outsourcing pakar/profesional dari institusi lain. Rakyat juga akan percaya bahwa partai oposisi tidak hanya bersuara sumbang (no action talking only/NATO), namun memiliki kinerja yang teruji. Fungsionaris partai mungkin bisa menduduki jabatan publik, tapi harus sejalan dengan bidang yang diurusnya.

Kedua, **Anggota Legislatif** berperan sebagai tokoh di daerah pemilihannya yang betul-betul memahami aspirasi konstituen/anggota dan warga, serta menjadi representasi partai yang mengakomodasi beragam kepentingan. Aleg harus memiliki basis massa yang kongkrit, bukan hanya numpang hidup dari partai dan datang sekali dalam lima tahun untuk membeli suara rakyat.

Ketiga, **Pejabat Eksekutif** di daerah menguasai basis territorial yang jelas: kabupaten/kota atau provinsi dengan segala sumberdaya (SDM/SDA). Kemampuan untuk mengendalikan birokrasi, sehingga birokrasi tidak menjadi "partai" dalam struktur pemerintahan yang justru mengkooptasi kepala daerah. Sebagai Kepala Daerah harus berinteraksi dan mampu mengkoordinasikan Forum Pimpinan Daerah (Kejaksaan, Kepolisian/TNI, Pengadilan, dan Pengawasan). Jangan sampai terjebak politik sandera (interlocking) karena kesalahan atau kasus yang dikendalikan pihak lain.

Keempat, **Tokoh Nasional** sebagai simbol kepemimpinan bangsa yang bervisi maju sesuai dengan cita-cita nasional yang termaktub dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Tidak selalu menduduki jabatan formal, sebab dengan ilmu dan keteladanannya bisa menjadi Guru Bangsa atau Guru Peradaban/Kemanusiaan. Sehingga tidak terjadi post power syndrome dalam dinamika partai, bahkan tidak terjebak politik dinasti (mewariskan kekuasaan kepada keluarga/kerabat), sebab semua orang punya tugas mulia di sektor/disiplin masing-masing. Pada tahap puncak, kontribusi politik tidak hanya ditandai oleh penghargaan Bintang Mahaputra, melainkan juga menjadi Pahlawan Nasional atau tokoh teladan di tengah masyarakat.



SIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Pergeseran konstelasi nasional mungkin terjadi karena aspirasi masyarakat yang menginginkan perubahan (20 persen) lebih besar daripada yang nyaman dengan kondisi status quo (18 persen) dan menghendaki keberlanjutan (kepentingan pribadi/kelompoknya). Meskipun harus diakui mayoritas rakyat masih bimbang antara kehendak perubahan dan keberlanjutan (61 persen), karena mereka mengalami perubahan di masa lalu biasanya menimbulkan korban/ongkos sosial besar dan tidak menjamin bahwa tokoh yang baru akan membawa dan menerapkan visi perubahan sejati. Tugas partai dan tokoh perubahan untuk membuka dialog seluas-luasnya dan memberi bukti bahwa perubahan suatu keniscayaan dan bermanfaat positif, apabila dikelola/konsolidasi dengan baik.
2. Dinamika politik lintas partai dan antar elite politisi akan semakin tajam hingga penentuan capres/cawapres definitif (November 2023). Perlu dipersiapkan skenario yang paling buruk, apabila kondisi ideal tidak terpenuhi dengan target utama eksistensi partai dan perluasan peran partai pasca pemilu 2024. Sejak pemilu 2019, orientasi partai di Indonesia tidak ada lagi yang bersifat ideologi karena semua terpusat pada kepentingan, sehingga bergabung/koalisi atau berada di luar/oposisi pemerintah berdasarkan pertimbangan realistis. Yang perlu dipersiapkan adalah kondisi mental anggota dan respon publik yang muncul, apabila sikap politik yang ditempuh tidak 100 persen sejalan dengan target ideal anggapan umum.
3. Strategi penokohan dan pembesaran partai perlu berjalan secara mandiri dan simultan, tidak tergantung pada tokoh lain dengan alasan efek ekor jas. Tokoh ditampilkan secara natural di level masing-masing dengan kapasitas prima. Peningkatan kapasitas dilakukan melalui sekolah kepemimpinan secara berjenjang dan penugasan partai yang diawasi ketat. Penyiapan tokoh ini penting, sehingga ketika momentum perubahan terbuka, maka tidak terjadi kekosongan ketokohan. [sw]



Center for Indonesian Reform (CIR) is a research institution for strategy and public policy. It is also a clearing house for economic, social-politic, law and human right affairs. Established on November 30th, 2001, CIR as a nongovernmental organization works independently and impartially. CIR's Vision: To become a trusted institute for researching strategy and public policy in order to realizing the comprehensive Indonesian reform agenda. Programs and activities: 1) Reviewing strategic issues in the fields of socio-culture, economy-politics and defense-security; 2) Survey of public perceptions on service quality and the process of public policy making; 3) Monitoring actual issues in mass media coverage and conversations on social media; 4) Publish "Policy Review" journals and books related to strategic issues and public policies; and 5) Conducting Dialogues and Seminars to response problems that develop in society with sources from various backgrounds.

Office: Arkadia Green Park, Tower G, 8th Floor, Jl. TB Smitupang Kav. 88, South Jakarta 12520. **Phone:** +62 21 3000 6718. **Website:** www.cir.or.id